

FENOMENA POLITIK DINASTI SEBAGAI TANTANGAN BAGI SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NIAS

By Nodiveman Waruwu

1
**FENOMENA POLITIK DINASTI SEBAGAI TANTANGAN BAGI SISTEM
DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS NIAS**

SKRIPSI



Oleh

**NODIVEMAN WARUWU
NIM. 202119037**

42
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NIAS
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, atau kekuasaan warga negara, atas negara, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara. Prinsip trias politica, yang merupakan salah satu pilar demokrasi, membagi kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), ke dalam tiga jenis lembaga negara yang sejajar satu sama lain dan tidak saling lepas (independen). Untuk memastikan bahwa ketiga lembaga Negara ini sejalan dan independen, mereka dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain, Suparyanto (2018:1). Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik tempat individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, Schmitter (2018:3).

Sistem demokrasi prosedural berarti perlunya proses pemilihan terbuka, pembentukan pendapat, dan kemauan, serta partisipasi masyarakat yang luas dalam pemilihan dan pemilihan. Dalam situasi seperti ini, proses politik yang tepat dan efektif diperlukan. Jika semua warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih, jika para pengambil keputusan (presiden, perdana menteri, dan badan legislatif) dipilih melalui pemilu yang adil dan jujur, jika para kandidat dapat bersaing dan memperoleh suara mereka, dan jika semua kandidat memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka, sistem politik dianggap demokratis, Parera (2023:1).

Rakyat diberi hak politik untuk berpartisipasi dan bertindak secara bebas dalam sistem yang digunakan untuk memilih pembuat kebijakan dan membuat keputusan otoritatif yang berkaitan dengan kepentingan nasional, regional, atau lokal. Hak seluruh orang dewasa untuk memilih dan berkompetisi untuk posisi politik dilindungi oleh sistem di negara-negara yang dikategorikan sebagai "bebas". Selain itu, para wakil terpilih memiliki kemampuan untuk memberikan suara yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan sipil ini mencakup kebebasan untuk mengembangkan otonomi pribadi, organisasi, dan pikiran. (Freedom House: metodologi survei). Selain itu, demokrasi berfungsi sebagai sistem politik

untuk melakukan keputusan publik demi kepentingan umum. Kepentingan umum adalah tujuan utama negara demokrasi, Singh (2021:12).

Salah satu negara yang memiliki pemerintahan demokratis adalah Indonesia. Ada kemungkinan bahwa munculnya demokrasi di Indonesia seiring dengan pembentukan negara Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan, dengan sistem politik yang sama. Selama masa Presiden Soekarno, model sistem demokrasi berubah dua kali: dari demokrasi parlementer (liberal) menjadi demokrasi terpimpin. Gagalnya demokrasi parlementer disebabkan oleh keyakinan Presiden Soekarno bahwa model ini tidak efektif dalam politik global saat ini. Pada akhir tahun 1950-an, Soekarno mencoba demokrasi terpimpin, bentuk demokrasi baru. Jika demokrasi diterapkan secara terpimpin, itu tidak hanya tidak demokratis tetapi juga mengarah pada kediktatoran. Dalam sejarah perkembangan Indonesia yang berbeda, demokrasi seringkali mengalami masa transisi yang dimulai pada awal kemerdekaan. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik yang terjadi pada saat itu, Suparyanto (2018:26).

Namun, setelah Orde Lama berakhir pada tahun 1965, Orde Baru muncul, yang secara drastis mengubah demokrasi menjadi negara yang otoriter dan feodalistik. Dalam hal ini, demokrasi kehilangan maknanya. Di bawah pemerintahan otoriter Soeharto, keinginan orang tidak didengarkan. Tidak ada ruang atau kebebasan yang diberikan kepada suara kritis masyarakat. Seperti yang diketahui, selama pemerintahan Orde Baru, demokrasi warga sangat terbatas karena kontrol negara yang kuat, yang mengakibatkan perampasan hak politik warga negara. Ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru, demokrasi sebenarnya tidak relevan atau tidak lagi relevan, Suparyanto (2018:32).

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik signifikan. Ini ditandai dengan munculnya gerakan reformasi dan berakhirnya sistem otoriter Orde Baru pemerintahan Soeharto. Kaum muda Indonesia tidak puas dan kecewa dengan pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, dengan pengunduran diri Soeharto dari kursi kekuasaan, sistem Orde Baru pada akhirnya runtuh. Indonesia mengadopsi sistem pemilihan secara langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Ini meningkatkan citra demokrasi Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki banyak pemerintahan yang berbeda selama pemerintahan Soeharto, demokrasinya masih belum sepenuhnya merdeka. Singkatnya, demokrasi yang ideal masih jauh dari harapan rakyat Indonesia dan bahkan hampir tidak ada

dalam perpolitikan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah praktik politik dinasti yang semakin berkembang di perpolitikan Indonesia, secara bertahap merusak demokrasi negara, Suparyanto (2018:33).

Dinasti politik adalah bentuk kekuasaan keluarga politik yang bertanggung jawab atas pemerintahan nasional dan lokal. Pada konteks tradisional, arti dinasti adalah penguasa meletakkan keluarga, saudara kandung, dan anggota keluarganya pada jabatan yang sangat strategis dengan tujuan membangun dinasti kerajaan politik di dalam pemerintahan. Dinasti politik dibuat untuk memastikan bahwa anggota keluarga politik memiliki kontrol atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya keluarga politik di jabatan strategis akan memudahkan pengusaha untuk mengontrol dan mengontrol ritme politik di tingkat penyelenggaraan pemerintahan, Syiah (2021:50).

Praktik politik dinasti di Indonesia menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi masa depan generasi muda negara dan negara. Politik dinasti di Indonesia bukanlah hal baru, tetapi sudah lama ada. Kehadiran Siti Hardiyanti Rukmana, putri Soeharto, yang telah menjabat sebagai presiden selama bertahun-tahun, menunjukkan praktik politik dinasti mulai berkembang ketika era Orde Baru dimulai. Dari tahun 1992 hingga 1998, Siti Hardiyanti Rukmana, juga dikenal sebagai Tutut, adalah anggota MPR RI dari Fraksi Golkar. Setelah itu, ayahnya sendiri, Soeharto, menunjuknya sebagai Menteri Sosial ke-23. Namun, dia hanya menjabat selama beberapa bulan karena kurangnya reformasi di masyarakat Indonesia. Menariknya, ketika Orde Baru runtuh, praktik politik dinasti malah meningkat dengan cepat, seperti yang terlihat dalam politik Indonesia saat ini, (Parera, 2023:4).

Di samping mempertahankan kekuasaan dan praktik korupsi, politik dinasti menempatkan sistem demokrasi Indonesia dalam bahaya besar. Ini terutama berlaku untuk pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu cara utama untuk mempertahankan sistem politik demokratis adalah pemilihan umum. Ini berarti bahwa keputusan bersama adalah hasil dari proses demokrasi yang melibatkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam ranah sosio-politik dengan dasar ketidakpihak. Oleh karena itu, salah satu karakteristik negara dan masyarakat demokratis adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Ini menunjukkan bahwa orang memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi, perkumpulan yang dianggap penting untuk mengisi dan mengembangkan kehidupan mereka baik sebagai kelompok

maupun individu dalam masyarakat. Hal ini juga terkait dengan kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat dan pendapat mereka. Fitzpatrick (2009:50), dinasti politik dari sudut pandang persamaan (*equality*), bahwa keluarga politik telah menutup kesempatan bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam politik.

Di balik kenyataan ini, ada kenyataan bahwa warga negara menghadapi berbagai tantangan ketika mereka ingin berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Ini sangat berbeda dari demokrasi yang sebenarnya, di mana rakyat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan kata lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam kontestasi untuk jabatan di tingkat regional dan nasional. Selain itu, kehadiran politik dinasti menimbulkan kekhawatiran tentang ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan politik, yang dapat mencerminkan kekurangan representasi politik demokratis, yang dikenal sebagai "kekuatan melahirkan kekuatan". Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perselisihan dari tingkat regional hingga nasional membuat substansi demokrasi sulit diwujudkan dalam kehidupan perpolitikan Indonesia, dan hal ini berdampak pada kemajuan demokrasi. Kesuburan politik dinasti tentu tidak terlepas dari peran partai politik dan undang-undang pilkada, sehingga kualitas demokrasi semakin suram dan terancam hilang. Selain itu, pengawasan dan pembatasan praktik politik dinasti hanya didasarkan pada nilai-nilai moral tentang kepatutan dan kepatutan. Karena tidak ada pengawasan yang ketat, politik dinasti terus berkembang dan mengegerogoti kehidupan politik Indonesia, memengaruhi sistem demokrasi, Hadiz (2005:113).

Praktik politik dinasti terlihat dalam pemilihan umum, di mana hubungan yang dibangun para elit politik dengan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, lebih penting daripada kualitas. Dengan kata lain, praktik politik dinasti Indonesia dapat menghalangi kemunculan pemimpin yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang abal-abalan karena jaringan hubungan. Ironisnya, banyak dari mereka terlalu fokus pada materi, bahkan korupsi, dan mengabaikan tujuan utama, yaitu menciptakan bonum commune. Pada saat ini, eksistensi politik dinasti di Indonesia digunakan untuk mempertahankan status atau kekuasaan dengan mewariskan kekuasaan kepada orang lain yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga. Pada dasarnya, ada banyak pro dan kontra terhadap politik dinasti; ada yang

menganggapnya baik karena menjaga kesetabilan politik, dan ada juga yang menganggapnya sebagai alat yang digunakan para pejabat untuk mempertahankan kekuasaan mereka, dan mempersulit orang lain untuk berpartisipasi dalam lembaga perpolitikan karena calon pemimpin politik dinasti biasanya menerima lebih banyak dukungan. Ada pro dan kontra dalam politik dinasti, serta pengertian positif dan negatif. Baik efek positif maupun negatif dari politik dinasti tergantung pada proses dan hasil dari jabatan yang dipegang oleh jaringan politik dinasti. Pertama, politik dinasti dianggap positif jika proses pemilihannya murni demokratis dan kepemimpinannya membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, politik dinasti memiliki makna negatif karena dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, sistem hukum, penegakan hukum, dan pelebagaan politik yang relevan. Misalnya, jika politik dinasti terjadi di masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, dan pelebagaan politik yang tidak stabil, maka politik tersebut dapat memiliki makna negatif, (Parera, 2023:6).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti terkait politik dinasti di Indonesia peneliti mendapatkan informasi dari salah seorang mahasiswa Universitas Nias bahwa pada saat ini praktik politik dinasti memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap akuntabilitas pada birokrasi karena terdapat kecenderungan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dinasti politik seperti demikianlah yang nantinya akan memberikan potensi tatanan politik yang buruk di tengah konsistensi reformasi birokrasi dan jika kekuasaan itu dibangun atas adanya ikatan keluarga, maka akan menciptakan kesenjangan ketika faktor keluarga akan bersifat mencampuri urusan yang bersifat umum. Maka, hal tersebut tidak lain akan menjadikan situasi dimana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi prioritas dalam sebuah dinasti politik. Dengan demikian dalam perpolitikan yang baik maka tidak perlu melakukan dinasti politik untuk membawa Indonesia ke arah yang berkemajuan, oleh karena itu peneliti menarik judul penelitian ialah **“Fenomena Politik Dinasti sebagai Tantangan bagi Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa Universitas Nias”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian diarahkan pada, “Fenomena Politik Dinasti sebagai Tantangan bagi Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa Universitas Nias”.

44

1.3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan pada penelitian ini yaitu :

- 1.3.1. Bagaimana politik dinasti tersebut dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias?
- 1.3.2. Mengapa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias?

47

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- 1.4.1. Untuk mengetahui Bagaimana politik dinasti tersebut dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias.
- 1.4.2. Untuk mengetahui Mengapa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias.

46

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian antara lain :

- 1.5.1. Bagi pemerintah, untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran dalam menangani fenomena politik dinasti. Ini bisa mencakup reformasi kebijakan politik, regulasi yang lebih ketat terkait dengan pemilihan umum, atau upaya untuk mendorong pluralisme politik yang lebih sehat.
- 1.5.2. Bagi pemangku kepentingan, dapat digunakan sebagai pengetahuan untuk belajar atas fenomena politik di Indonesia dan guna untuk menghindari diri dari praktik dinasti politik.
- 1.5.3. Bagi masyarakat, memperluas pengetahuan dan mengetahui kondisi yang akan dihadapi.
- 1.5.4. Bagi peneliti berikutnya, mendorong rasa ingin tahu terhadap fenomena dinasti politik di Indonesia dan belajar sehingga dapat membawa hal positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Demokrasi dan Politik Dinasti di Indonesia

2.1.1. Pengertian Demokrasi

Wirangani (2017:2), dalam bahasa Yunani, "demokrasi" berasal dari dua kata, "demos" yang berarti rakyat, dan "kratos" atau "cratein" yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih umum dikenal sebagai "pemerintahan rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Dalam bidang ilmu politik, istilah "demokrasi" telah berkembang menjadi istilah yang sangat penting. Hal ini wajar karena saat ini demokrasi dianggap sebagai pengukur kemajuan politik suatu negara. Demokrasi sangat penting dalam pembagian kekuasaan negara, biasanya berdasarkan trias politica, dengan kekuasaan yang diperoleh rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip trias politica ini menjadi penting untuk dipertimbangkan ketika sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar tidak cukup untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab; kekuasaan absolut seringkali mengakibatkan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, kekuasaan yang berlebihan di lembaga negara yang lain, seperti lembaga legislatif, untuk menetapkan anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR tanpa mempertimbangkan keinginan rakyat, tidak akan menguntungkan. Pada dasarnya, semua lembaga negara harus bertanggung jawab. Selain itu, ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas tersebut, dan mekanisme ini dapat secara operasional dan teoritis membatasi kekuatan lembaga negara tersebut.

Bahasa demokrasi pertama kali di perkenalkan oleh Aristoteles sebagai jenis pemerintahan, yaitu jenis pemerintahan di mana banyak orang (rakyat) memiliki kekuasaan. Demokrasi telah berkembang menjadi sistem yang dianut hampir di seluruh dunia. Salah satu karakteristik pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

- a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
- c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

- d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat di tinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi” menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

- a. Kedaulatan rakyat;
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- c. Kekuasaan mayoritas ;
- d. Hak-hak minoritas;
- e. Jaminan hak asasi manusia;
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Proses hukum yang wajar;
- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Wirangani (2017:29), Sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait mengait dan fungsional. Sistem dapat di artikan pula sebagai suatu yang lebih tinggi dari pada sekedar merupakan cara, tata rencana, skema, prosedur atau metode. Sedangkan politik dapat di simpulkan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Dapat di simpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).

2.1.2. Politik Dinasti di Indonesia

2.1.2.1. Sejarah Politik Dinasti di Indonesia

Politik dinasti di Indonesia sudah ada sejak Orde Lama, mulai dari keluarga Presiden Soekarno, yang merupakan presiden pertama negara itu. Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno adalah politisi keturunan Soekarno. Keluarga Gusdur (KH. Abdurrahman Wahid) menunjukkan dinasti politik, dengan saudara kandung dan anak kandungnya terjun ke politik. Selain itu, Megawati Soekarnoputri menunjukkan gejala dinasti politik karena keterlibatan aktifnya Puan Maharani dalam perpolitikan Indonesia hingga akhirnya menjadi ketua DPR RI. Keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukannya. Keluarga SBY juga terlibat dalam perpolitikan Indonesia, termasuk Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa. Dinasti politik terus berkembang hingga saat ini, (Gunanto 2020:180).

Pada awalnya, masyarakat menganggap politik dinasti sebagai virus demokrasi, dengan harapan bahwa dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden, virus ini akan hilang. Namun, faktanya adalah bahwa Jokowi telah tertular virus dari elit politik masa lalu yang melakukan nepotisme dan politik dinasti. Jokowi telah memberikan restu kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjabat sebagai walikota Solo. Dilaporkan bahwa Bobby Nasution, menantu Jokowi, dan putranya juga akan maju sebagai wali kota Medan. Bahkan Siti Nur Azizah, anak dari Wakil Presiden RI dari tahun 2019 hingga 2020, Ma'ruf Amin, mencalonkan diri untuk menjadi Wali Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020. Dinasti politik juga berkembang di tingkat lokal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), banyak bupati daerah yang terpilih pada tahun 2010 bersatus sebagai kerabat kepala daerah sebelumnya. Misalnya, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, yang merupakan anak kandung mantan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani HR; Bupati Lampung Selatan, Rycko Mendoza, yang merupakan putra Gubernur Lampung, Sjachruddin Z. Selain itu, saudara-saudara Syahrul Yasin Limpo, yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dari 2008 hingga 2012, adalah pejabat: Ikhsan Yasin Limpo, Bupati Gowa dari 2005 hingga 2010; Haris Yasin Limpo, anggota DPRD kota Makassar dari 2004 hingga 2009; dan Tenri Olle, anggota DPRD Sulawesi Selatan dari 2009 hingga 2014. Selain itu, anak Syahrul Yasin Limpo, Indira Thita Chunda, menjabat sebagai anggota DPR

dari tahun 2009 hingga 2014, dan keponakannya, Adnan Purichta, menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga 2014, (Gunanto 2020:181).

Mietzner, (2020:183) menilai bahwa kecenderungan politik dinasti secara signifikan menguat dalam politik Indonesia modern. Dia berpendapat bahwa demokrasi rusak oleh praktik politik dinasti. Kontrol terhadap pemerintah, yang sangat penting bagi negara demokrasi, dilemahkan oleh politik dinasti. Karena dalam sistem politik tertentu, elit politik terhubung melalui hubungan keluarga atau perkawinan, pengamat politik sering menyebut dinasti politik sebagai oligarki politik. Di Indonesia, orang-orang yang berada di puncak kekuasaan memiliki kekuatan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Mereka cukup mudah mendapatkan kekuasaan dalam kontestasi politik.

Di Indonesia, dinasti politik telah ada dan berkembang sejak Orde Lama. Namun, dinasti politik lokal muncul sejak pilkada langsung diberlakukan pada tahun 2005 dan otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001. Sebagai bentuk demokratisasi lokal, berbagai kelas politik lokal muncul untuk mengooptasi kedua proses tersebut, proses yang dikenal sebagai reorganisasi kekuasaan. Kekuasaan para elit dibatasi oleh pusat pada masa Order Baru. Mekanisme yang digunakan cenderung melibatkan pengangkatan langsung. Orang-orang di kalangan elit lokal yang mendukung Orde Baru mendapatkan keistimewaan, sedangkan mereka yang menentanginya dapat tersingkir dari arena politik lokal.

Querubin (2012:23) selain itu, istilah "dinasti politik" digunakan untuk menggambarkan upaya khusus yang dilakukan oleh kelompok elit untuk mempertahankan dan memperoleh kembali kekuasaan mereka dari waktu ke waktu, di mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Selain itu, Jati (2014:23) mendefinisikan dinasti politik sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Dua kelompok yang pro dan kontra terhadap Orde Baru memanfaatkan momentum transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah. Kelompok-kelompok ini memperoleh kekuasaan penuh di daerahnya dalam perlombaan untuk menjadi elit pemenang dan membangun sinergi, biasanya melalui jalur perkawinan. Tidak mengherankan jika raja-raja kecil muncul setelah otonomi daerah. "Cendanasasi" lokal kemudian menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan politik lokal selama Orde Baru. Istilah "cendanasasi" mengacu pada Keluarga

Cendana selama kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat dominan dalam ekonomi dan politik Indonesia selama 32 tahun. Keluarga Cendana berkuasa selama tiga puluh tahun, dengan anak-anak, menantu, kemenakan, dan kerabat lainnya menguasai posisi pemerintahan sraegis. Keluarga elit saat ini dipengaruhi oleh pola ini untuk menjalankan politik dinasti mereka dan menempatkan kerabat mereka di posisi strategis di pemerintahan. Ada dua cara di mana dinasti politik di Indonesia dilakukan: secara kebetulan atau dirancang. Diniasti politik telah ada sejak lama. Secara hubungan, hubungan keluarga dalam pemerintahan sangat kuat, sehingga keluarga yang masuk ke dalam pemerintahan atau berpartisipasi dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat memastikan bahwa tujuan mereka tercapai. Adapun dinasti politik yang terjadi secara tidak sengaja, terjadi ketika keluarga pemimpin pemerintahan secara tiba-tiba mencalonkan diri untuk mengambil alih posisi mereka demi mempertahankan kekuasaan informal terhadap pengganti mereka jika mereka menang dalam perlombaan politik, (Gunanto 2020:184).

Dalam dunia politik kontemporer, elit politik yang bergantung pada hubungan keluarga atau hubungan pernikahan disebut sebagai oligarki politik oleh mereka yang mengamati politik. Kelompok yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di Indonesia dikenal sebagai kelompok elit. karena mereka kadang-kadang dapat mencapai otoritas dengan mudah atau berjuang untuknya. Sebelum tanda-tanda dinasti politik muncul, kelompok elit tersebut dikenal sebagai partai politik, militer dan polisi, pengusaha atau pemodal, agama, preman atau mafia, artis, dan aktivis, Bathoro (2011:24).

2.1.2.2. Karakteristik Dinasti Politik

Konsep dan karakteristik dinasti politik, Djati (2014:15)

- a. Kepemimpinan Turun Temurun: Politik dinasti di Indonesia sering ditandai dengan kecenderungan adanya keluarga atau keturunan yang secara berurutan memegang kekuasaan politik. Contohnya adalah keluarga Soekarno, Soeharto, dan beberapa keluarga gubernur atau bupati yang memimpin wilayah-wilayah tertentu selama bertahun-tahun.
- b. Konsentrasi Kekuasaan: Keluarga-keluarga politik yang mendominasi seringkali memiliki pengaruh yang besar di berbagai tingkatan pemerintahan, baik di tingkat

nasional maupun lokal. Mereka bisa memiliki kendali yang signifikan terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tempat mereka berkuasa.

- c. Nepotisme: Praktik nepotisme tidak jarang terjadi dalam politik dinasti di Indonesia. Anggota keluarga yang berkuasa cenderung mendapatkan posisi atau keuntungan tanpa memperhatikan kualifikasi atau kompetensi mereka. Ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam sistem politik dan administrasi publik.
- d. Ketidakstabilan Politik: Politik dinasti di Indonesia juga dapat rentan terhadap ketidakstabilan. Ini bisa disebabkan oleh konflik internal antar anggota keluarga, protes publik terhadap praktik nepotisme dan korupsi, atau perlawanan dari oposisi politik.
- e. Kepentingan Keluarga di Atas Kepentingan Umum: Seringkali dalam politik dinasti, kepentingan keluarga yang berkuasa ditempatkan di atas kepentingan umum. Hal ini bisa mengakibatkan pembuatan kebijakan yang lebih menguntungkan keluarga tersebut daripada masyarakat secara keseluruhan.
- f. Reproduksi Sosial dan Ekonomi: Politik dinasti juga terkait dengan reproduksi sosial dan ekonomi, di mana kekuasaan, kekayaan, dan status sosial ditransfer ³⁷ dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan dalam masyarakat.
- g. Resistensi dan Perlawanan: Meskipun politik dinasti cenderung bertahan untuk jangka waktu yang lama, mereka juga sering menghadapi resistensi dan perlawanan dari masyarakat yang menentang dominasi keluarga tersebut. Protes, gerakan reformasi, dan perubahan politik adalah respons yang mungkin terjadi terhadap politik dinasti di Indonesia.

2.1.2.3. ⁴¹ Dampak Dinasti Politik Dinasti terhadap Demokrasi

Dinasti politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi dalam sebuah negara. Berikut adalah beberapa dampak di mana dinasti politik dapat mempengaruhi demokrasi:

- a. Konsentrasi Kekuasaan: Dinasti politik sering kali menciptakan konsentrasi kekuasaan di tangan satu keluarga atau aliansi kecil, yang dapat mengurangi pluralisme politik dan persaingan yang sehat dalam demokrasi. Ini dapat

mengakibatkan monopoli politik yang menghambat partisipasi masyarakat yang lebih luas, Keman (2007:317).

- b. **Korupsi dan Nepotisme:** Dinasti politik sering kali terkait erat dengan korupsi dan nepotisme, di mana anggota keluarga atau orang-orang terdekat mendapat perlakuan istimewa dalam hal jabatan politik atau akses ke sumber daya negara. Hal ini merusak prinsip meritokrasi dan integritas demokrasi, Ackerman (1999:14).
- c. **Loyalitas yang Berlebihan:** Dalam dinasti politik, loyalitas terhadap keluarga atau kelompok politik tertentu sering kali diutamakan daripada prinsip-prinsip demokrasi. Ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, Stepan (1996:16).
- d. **Ketergantungan Institusi pada Pemimpin Tunggal:** Dinasti politik sering kali menciptakan ketergantungan institusi-institusi negara pada pemimpin tunggal atau keluarga politik tertentu. Hal ini dapat menghambat pembangunan institusi yang kuat dan independen, yang merupakan salah satu prasyarat bagi demokrasi yang berfungsi baik, Huntington (1991:1).
- e. **Polarisasi Politik yang Ekstrim:** Dinasti politik sering kali memperkuat polarisasi politik, dengan kelompok pendukung dan oposisi yang terbagi secara tajam di sekitar keluarga atau individu tertentu. Hal ini dapat menghambat kompromi dan kerjasama lintas partai yang penting untuk stabilitas demokrasi, Rokkan (1967:2).

2.1.2.4. Tantangan ⁴¹ Dinasti Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

Dinasti politik mempengaruhi representasi politik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan, serta dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat, terutama mahasiswa, Kusumah. (2016: 133-156).

- a. **Pengaruh terhadap Representasi Politik:** Dinasti politik sering kali membatasi akses bagi individu atau kelompok di luar lingkaran dinasti untuk ikut serta dalam proses politik. Anggota dinasti atau orang-orang terkait dapat diberikan prioritas dalam penunjukan kandidat, pembagian sumber daya, dan penentuan kebijakan. Ini menghasilkan representasi politik yang tidak merata dan tidak mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Contohnya, dalam sebuah dinasti politik, anggota keluarga mungkin dicalonkan untuk berbagai posisi politik tanpa memperhatikan kualifikasi atau dukungan masyarakat.

- b. Pengaruh terhadap Akuntabilitas dan Transparansi: Dinasti politik cenderung menguasai berbagai institusi pemerintah dan sumber daya politik yang penting. Hal ini dapat menghambat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap tindakan pemerintah. Kurangnya persaingan politik yang sehat dapat mengakibatkan kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam kasus dinasti politik, lembaga pengawas mungkin tidak dapat beroperasi secara independen atau efektif, karena mereka dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh kelompok politik yang berkuasa.
- c. Dampak terhadap Partisipasi Politik Masyarakat, Khususnya Mahasiswa: Dinasti politik dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, termasuk mahasiswa, dengan beberapa cara. Pertama, dominasi dinasti politik dapat membuat mahasiswa merasa putus asa atau kehilangan motivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik karena persepsi bahwa kekuasaan telah dikonsolidasikan oleh kelompok tertentu yang sulit untuk digantikan. Kedua, mahasiswa yang mencoba berpartisipasi atau menyuarakan opini mereka dapat dihadapkan pada hambatan politik, seperti represi atau pengucilan, dari pihak yang berkuasa. Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi dan pluralisme politik di masyarakat.

Melalui pemahaman tentang bagaimana dinasti politik mempengaruhi representasi politik, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik masyarakat, khususnya mahasiswa, kita dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh sistem politik dan mencari solusi untuk memperbaikinya demi mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Tantangan-tantangan ini dapat merusak esensi demokrasi yang seharusnya mendorong partisipasi politik yang inklusif, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Upaya untuk mengatasi dinasti politik perlu mencakup reformasi politik yang menasar pada penguatan institusi-institusi demokratis, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Selain itu, pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembatasan kekuasaan politik dan perlunya partisipasi aktif dalam proses politik.

2.1.2.5. Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Konteks Dinasti Politik di Indonesia

Secara umum, dinasti politik cenderung mengakibatkan monopoli kekuasaan yang mempersempit ruang bagi partisipasi politik dari kelompok-kelompok lain, termasuk mahasiswa. Berikut adalah beberapa cara di mana dinasti politik mempengaruhi keterlibatan mahasiswa, Mietzner & Marcus (2013:1).

- a. Kendali atas Sumber Daya dan Akses Kekuasaan: Dinasti politik sering kali memiliki kendali penuh atas sumber daya politik dan ekonomi, serta akses yang lebih mudah ke institusi-institusi kekuasaan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini dapat membuat mahasiswa merasa sulit untuk terlibat secara aktif dalam proses politik yang sering kali dikuasai oleh dinasti tersebut.
- b. Pembatasan Ruang Demokratis: Dinasti politik cenderung membatasi ruang demokratis dan mengurangi transparansi dalam proses politik. Praktik-praktik seperti nepotisme, korupsi, dan penggunaan kekerasan politik dapat membuat mahasiswa merasa tidak nyaman atau takut untuk menyuarakan pendapat mereka atau terlibat dalam aktivitas politik yang kritis terhadap dinasti politik.
- c. Kontrol Terhadap Media dan Informasi: Dinasti politik sering kali memiliki kontrol yang besar terhadap media massa dan aliran informasi. Hal ini dapat menghambat mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang isu-isu politik yang relevan.

Meskipun dihadapkan dengan hegemoni dinasti politik, mahasiswa masih memiliki potensi untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih baik. Beberapa upaya dan strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa antara lain, Nasir & Abdul (2010:183-194).

- a. Pendidikan Politik: Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan pentingnya partisipasi politik melalui pendidikan politik. Hal ini dapat memperkuat kesadaran politik mereka dan mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam gerakan demokratis.
- b. Organisasi dan Mobilisasi Mahasiswa: Mahasiswa dapat membentuk organisasi politik independen yang bertujuan untuk memperjuangkan reformasi politik dan demokrasi yang lebih baik. Dengan melakukan mobilisasi massa, mereka dapat meningkatkan tekanan publik terhadap dinasti politik untuk melakukan perubahan.

- c. Kolaborasi dengan Aktor Sipil Lainnya: Mahasiswa dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok sipil lainnya seperti LSM, media independen, dan aktivis hak asasi manusia untuk memperkuat gerakan demokratis. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kekuatan politik mereka dan memperluas basis dukungan.
- d. Advokasi dan Kampanye: Mahasiswa dapat melakukan advokasi dan kampanye untuk reformasi politik yang spesifik, seperti perubahan undang-undang pemilu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta pemberantasan korupsi. Dengan melakukan ini, mereka dapat secara langsung mempengaruhi agenda politik dan kebijakan.

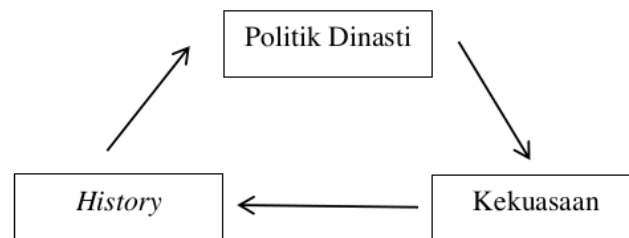
2.1.2.6. Reformasi Politik dan Dinasti Politik di Indonesia

Reformasi politik pasca Orde Baru di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik negara tersebut. Salah satu fenomena yang masih menjadi perhatian adalah keberlanjutan dinasti politik. Dinasti politik mengacu pada dominasi keluarga atau individu tertentu dalam dunia politik, di mana kekuasaan dan kendali politik sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Winters (2011:19).

Reformasi politik di Indonesia telah membawa perubahan dalam upaya mengurangi dominasi dinasti politik. Beberapa langkah telah diambil untuk mencapai hal ini, seperti pengenalan mekanisme pemilihan yang lebih transparan dan partisipatif, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya rotasi kekuasaan dan pluralisme politik. Salah satu cara reformasi politik telah berhasil mengurangi dominasi dinasti politik adalah dengan memperkenalkan aturan yang membatasi masa jabatan politisi. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu keluarga atau individu untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Misalnya, aturan batas masa jabatan untuk presiden, gubernur, dan kepala daerah lainnya telah diimplementasikan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Selain itu, reformasi politik juga telah memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelanggaran etika politik, termasuk praktik-praktik nepotisme dan korupsi yang sering terkait dengan dinasti politik. Langkah-langkah ini mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran aturan dalam pemilihan umum dan pengawasan terhadap pembiayaan kampanye, Wahid (2017:28).

Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperkuat sistem demokrasi dan mengurangi dominasi dinasti politik di Indonesia. Salah satunya adalah resistensi dari elit politik yang telah terbiasa dengan kekuasaan dan kontrol politik yang mereka miliki. Kelompok-kelompok ini mungkin berusaha untuk menghindari atau menentang implementasi reformasi politik yang dapat mengancam posisi dominan mereka. Selain itu, masih ada kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran etika politik. Terkadang, lembaga-lembaga penegak hukum dapat menjadi rentan terhadap tekanan politik atau intervensi, yang mengurangi efektivitas mereka dalam menindak pelanggaran oleh elit politik. Aspinall (2014:3).

2.2. Kerangka Berpikir



Gambar 01: Bagan Kerangka Berpikir

5

Maksud dari kerangka pemikiran ini ialah, politik dinasti muncul karena adanya kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, dalam upaya mempertahankannya yaitu dengan membuat skema ketika masa jabatan kekuasaan sudah habis dan di saat itu dari jauh-jauh hari telah disiapkan pengganti kekuasaannya oleh keluarga atau kerabat dekatnya. Disaat itu terjadinya *history* yang melekat bahwa keluarga tersebut mantan penguasa dan hal ini timbul di dalam benak masyarakat, sehingga ketika adanya pengganti calon pemimpin yang akan menduduki singgahsana kekuasaan di suatu daerah maka ia akan terbantu oleh *history* yang telah terbentuk di dalam citra masyarakat. Ketika citra pemimpin sebelumnya baik dan dipandang oleh masyarakat dengan anggapan baik maka citra tersebut akan terjaga, hal ini memudahkan untuk memuluskan rencana estafet kekuasaan yang akan mendorong terjadinya politik dinasti.

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Peneliti melakukan metode kualitatif untuk pendekatan deskriptif. Menurut Fitrah (2017:36), pendekatan deskriptif merupakan hasil penelitian yang menggambarkan peristiwa saat ini dan sebelumnya. Dengan melakukan observasi dan mencatat fakta secara ilmiah dengan masalah yang diamati, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggali makna. Memberikan makna lengkap dalam bentuk kata dan kalimat (tindakan, keberadaan, dan pengalaman) dari perspektif manusia yang diteliti adalah tujuan dari metode penelitian kualitatif ini. Penelitian kualitatif berkaitan dengan ide, pengalaman, atau gagasan orang yang diteliti. Tidak ada penelitian kualitatif yang dapat diukur dengan angka. Peneliti memilih metode ini karena pertanyaan penelitian berfungsi untuk mengungkap fenomena penelitian. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap untuk mencapai tujuan penelitian dan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Nasution (2015:5), mengatakan: “Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah mengamati orang-orang dilingkungan mereka, berinteraksi dengan mereka, mencoba memahami bahasa mereka dan interpretasi dunia disekitar mereka”. Selanjutnya menurut Maizuar (2016:22), dikatakan bahwa “penelitian kualitatif bertujuan untuk memperlakukan masalah yang akan diteliti sebagai fenomena kompleks yang harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh”.

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif (saling berhubungan) partisipatoris (berpartisipasi), dan (memahami cara hidup dari perspektif orang di dalamnya). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2013:04) mendefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.2. Variabel Penelitian

Ada pun yang menjadi variabel pada penelitian ini yaitu:

a. Pengalaman Mahasiswa terhadap Dinasti Politik

Menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan mahasiswa tentang praktik dinasti politik di Indonesia. Fokusnya bisa termasuk seberapa sering mereka menyaksikan dinasti politik, bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan mereka terhadap sistem politik, dan apakah mereka melihatnya sebagai suatu tantangan bagi demokrasi.

b. Sikap Mahasiswa terhadap Dinasti Politik

Mengeksplorasi sikap mahasiswa terhadap praktik dinasti politik. Apakah mereka menentang atau menerima dinasti politik sebagai bagian dari sistem politik? Apakah mereka merasa bahwa dinasti politik membawa manfaat atau lebih merupakan hambatan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia?

c. Pengaruh Dinasti Politik terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa

Ini mencakup dampak dinasti politik terhadap partisipasi politik mahasiswa. Apakah keberadaan dinasti politik menginspirasi mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik, atau sebaliknya, apakah itu menghasilkan sikap skeptis dan apatis terhadap politik? Bagaimana dinasti politik memengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam pemilihan umum, organisasi politik kampus, atau gerakan sosial?

d. Persepsi Mahasiswa terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia

Mencakup pandangan mahasiswa tentang kualitas demokrasi di Indonesia dalam konteks dinasti politik. Apakah mereka percaya bahwa keberadaan dinasti politik merusak prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, akuntabilitas, dan representasi yang adil? Bagaimana pandangan mereka tentang upaya-upaya reformasi politik yang dapat mengurangi pengaruh dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi?

3.3. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kampus Universitas Nas Jln. Yos Sudarso No. 118/E-S, Ombolata Ulu, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Adapun alasan memilih kampus Universitas Nias sebagai lokasi peneliti adalah:

- a. Jarak antara tempat tinggal dengan lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti.
- b. Dilokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian mengenai Fenomena Politik Dinasti sebagai Tantangan bagi Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa Universitas Nias
- c. Peneliti berkeyakinan bahwa di kampus Universitas Nias layak untuk dilakukan penelitian & tentunya akan menjawab permasalahan yang diteliti.

58

3.3.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini di laksanakan pada semester genap tahun akademik 2023/2024.

NO	KEGIATAN	2023-2024					
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1	Penyusunan rancangan proposal penelitian	✓					
2	Revisi rancangan proposal penelitian		✓	✓			
3	Seminar rancangan penelitian			✓			
4	Pengurusan surat izin penelitian			✓			
5	Pengumpulan data			✓	✓		
6	Analisis data				✓	✓	
7	Ujian skripsi						✓

28

Tabel 01. Jadwal penelitian

3.4. Sumber Data

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Nias terutama program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan program studi lainnya.

61

3.5. Instrument Penelitian¹³

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2016:305) merupakan peneliti itu sendiri. Hal ini berarti seorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data³

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam kasus ini, alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik, termasuk rekaman suara dan gambar melalui ponsel.

3.6.1. Teknik Observasi

Menurut Sudjana dan Ibrahim (2017:109), menyatakan: Observasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur proses terjadinya perilaku atau aktivitas seseorang, baik dalam situasi aktual maupun dalam bentuk situasi tambahan.

Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan teknik observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diamati, dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, jelas, dan memahami tingkat makna dari setiap perilaku yang terjadi.

3.6.2. Teknik Wawancara⁷⁷

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dimana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Pewawancara mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada mahasiswa, disini pewawancara tidak membatasi jawaban dari nara sumber agar dapat jawaban yang luas dan mendalam dari narasumber. Sugiyono (2016:23), menyatakan bahwa: "Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertukar informasi dan ide melalui format tanya jawab untuk membangun makna topik tertentu". Selanjutnya Sukmadinata dan Sutopo (2016:112), menyatakan bahwa "Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban yang luas.

Dalam keterampilan wawancara, selain menyusun pedoman, sangat penting untuk mengembangkan hubungan (rapport) yang baik dengan orang yang diwawancarai. Responden bersedia memberikan jawaban atau jawaban secara objektif sangat tergantung pada hubungan baik yang terjalin antara pewawancara dan responden. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas dan wawancara mendalam.

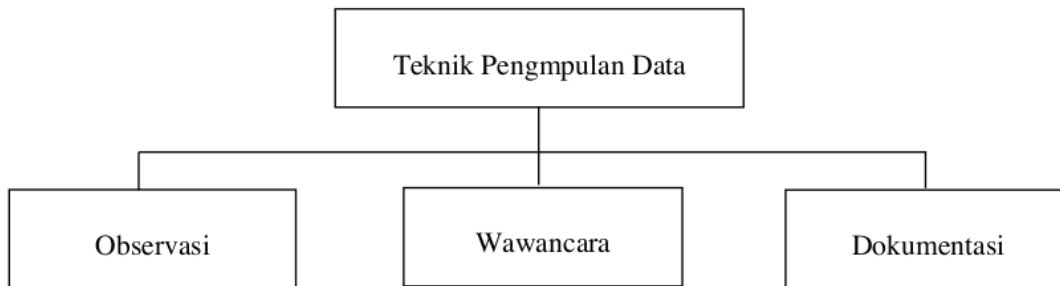
Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang lebih terbuka dari responden, dan pihak yang diundang untuk wawancara diminta pendapat dan pemikirannya. Tentang itu, Sutopo (2016:72) mengemukakan bahwa “wawancara mendalam berarti proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab antara pewawancara dan informan.

3.6.3. Teknik Dokumentasi

Menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Penulis mencatat semua jawaban dari hasil yang di temukan serta tidak lupa mengambil berkas data, dokumentasi langsung yang dianggap penting selama melakukan penelitian di Universitas Nias. Menurut Suharsimi Arikunto (2016:201), “Dokumen adalah barang tertulis”. Sugiyono (2016:82), mendefinisikan dokumen sebagai “catatan peristiwa yang telah terjadi”. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data yang diidentifikasi dari dokumentasi yang berkaitan dengan masalah.

Pemanfaatan dokumentasi bagi Lincoln & Guba (2015:276- 277), mempunyai sebagian kelebihan, ialah: Dokumentasi serta catatan ini senantiasa bisa digunakan paling utama sebab gampang diperoleh serta relatif murah. Ialah sumber data yang akurat. Dokumentasi serta catatan ialah data yang kaya. Keduanya ialah sumber yang formal yang tidak bisa disangkal, yang menggambarkan formal. Tidak semacam pada sumber manusia, baik dokumentasi ataupun catatan non reactive, tidak memberikan respon/reaksi atas pelakuan periset. Walaupun sebutan dokumentasi serta catatan kerap kali digunakan buat menampilkan satu makna, senantiasa pada dasarnya kedua sebutan tersebut memiliki makna yang berbeda apabila ditinjau dari tujuan serta analisis yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dimaksud bila digambarkan, sebagai berikut:



Gambar 02. Bagan Teknik Pengumpulan Data

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono (2016: 113), mengatakan bahwa: Analisis informasi kualitatif merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain. Sehingga bisa gampang dimengerti, serta temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis informasi yang digunakan oleh periset dalam riset ini merupakan analisis informasi kualitatif model Miles serta Huberman” (Sugiyono, 2015:115), dengan pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi serta verifikasi. Pengumpulan informasi yakni mencari, mencatat serta mengumpulkan seluruh informasi secara objektif serta terdapatnya kecocokan dengan hasil observasi serta wawancara dilapangan dengan pencatatan informasi yang dibutuhkan. Reduksi informasi merupakan merangkum serta memilah hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal berarti, dicari tema serta polanya serta membuang yang tidak butuh. Informasi yang sudah direduksi hendak membagikan cerminan yang lebih jelas, serta memudahkan periset buat melaksanakan pengumpulan informasi berikutnya, serta mencari apabila butuh.

Penyajian informasi merupakan penyajian informasi kedalam urutan sehingga strukturnya bisa dimengerti, sebaliknya verifikasi informasi merupakan langkah ketiga dalam menganalisis informasi riset, maksudnya mengambil kesimpulan dengan memilah informasi yang berarti, membuat jenis serta membuang informasi yang tidak dipakai. Verifikasi informasi bisa menanggapi fokus riset.

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data

Universitas Nias didirikan pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan SK Kemdikbud Ristekdikti Nomor 400/E/O/2021. Universitas Nias merupakan penggabungan Perguruan Tinggi IKIP Gunungsitoli menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, STIE Pembnas menjadi Fakultas Ekonomi serta penambahan fakultas baru yakni Fakultas Sains dan Teknologi.

Adapun Visi dan Misi Universitas Nias yaitu:

a) Visi

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang Pendidikan, Ekonomi, Sainstek, dan Sosial Budaya.

b) Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang terampil, kompetitif, inovatif, dan berkarakter;
2. Mengembangkan dan meyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi pendidikan, ekonomi, sainstek, dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan /atau sainstek untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu; dan
5. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga atau institusi lain untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tabel 02 : Struktural Universitas Nias

No	Jabatan	Nama Lengkap
1	Rektor	Eliyusus Waruwu, S.Pt., M.Si
2	Wakil Rektor I	Adieli Laoli, S.Pd., M.Pd.
3	Wakil Rektor II	Delipiter Lase, S.E., M.Pd

4	Wakil Rektor III	35 Suka'aro Waruwu, S.E.,S.H.,M.M.
5	Wakil Rektor IV	Mastawati Ndruru, S.Pd., M.Hum.
6	Dekan FKIP	57 Dr. Yaredi Waruwu, S.S., M.S.
7	Wakil Dekan I FKIP	Ratna N. Mendrofa, s.Pd., M.Pd
8	Wakil Dekan II FKIP	Noveri Amal Jaya Harefa, S.Pd., M.Pd
9	Wakil Dekan III FKIP	35 ina, S.Pd., M.Pd
10	Dekan FE	Maria Magdalena Bate'e, S.E., M.M
11	Wakil Dekan I FE	Serniati Zebua, SE., M.Si
12	Wakil Dekan II FE	Idarni Harefa, SE.,ME
13	Wakil Dekan III FE	Eliagus Telaumbanua, S.E., 78 M
14	Dekan FST	Dr. Ayler Beniah Ndraha, S.STP, M.Si
15	Wakil Dekan I FST	Betzy Victor Telaumbanua, S.Pi., M.Si
16	Wakil Dekan II FST	Putra Hidayat Telaumbanua, SP., M.M
17	Wakil Dekan III FST	Jurisman Waruwu, S.Kom, M.Kom
18	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	62 Dr. Ayler Beniah Ndraha, S.STP, M.Si
19	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Netti Kariani Mendrofa, S.Pd., M.Pd.
20	Kepala Pusat Jaringan dan Teknologi Informasi (PJTI)	Arliyanto Zai, S.Kom
21	Kepala Perpustakaan	
22	26 Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA)	Juniwan Zendrato, S.E
23	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Destiniar Zagoto, S.Pd
24	Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Meiman Hidayat Waruwu, S.E., M.Si
25	Kepala Biro Inovasi, Kerjasama dan Humas Universitas Nias	Trisman Harefa, S.S., M.Pd
26	Kabag Umum dan Kepegawaian	Palindungan Lahagu, S.E., M.M
27	Kabag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Intan Permata Hati Hulu, S.E., M.Si
28	Kabag Sistem Informasi Universitas	Novanolo Kristiawan Halawa, S.Kom
29	Kabag Registrasi dan Ijazah Universitas	Herlin Aprilian Mawarni Waruwu, S.Pd

30	Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Hosiana R. Damanik, S.Psi., M.Psi
31	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Lestari Waruwu, S.Pd., M.Pd
32	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Afore Tahir Harefa, S.Pd., M.Hum
33	Ketua Program Studi Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Novelina Andriani Zega, S.Pd., M.Pd
34	Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Eka Septiani Laoli, S.Pd., M.Pd.E
35	Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Eka Periaman Zai, S.Pd., M.Pd
36	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Yulisman Zega, S.Pd., M.Si
37	Ketua Program Studi PPKn pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Mukur Kasieli Hulu, S.H., M.H
38	Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Envilwan Berkat Harefa, S.Si., M.Pd
39	Ketua Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi	Yupiter Mendrofa, S.E., M.M
40	Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi	Serniati Zebua, SE., M.Si
41	Ketua Program Studi Agroteknologi pada Fakultas Sains dan Teknologi	Helmin Parida Zebua, S.Pd., M.Si
42	Ketua Program Studi Sumber Daya Akuatik pada Fakultas Sains dan Teknologi	Destriman Laoli, S.Pi., M.Si
43	Ketua Program Studi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi	Ofelius Laia, S.Kom., M.Kom

4.2. Temuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai mahasiswa Universitas Nias. Mereka mengumpulkan data melalui wawancara terbuka, yang berarti peneliti mengajukan pertanyaan tidak terbatas kepada mahasiswa.

Adapun temuan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

4.2.1. Bagaimana politik dinasti tersebut dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Universitas Nias bahwa politik dinasti adalah politik yang mengatasnamakan sistem kekeluargaan atau kepentingan

pemimpin. Sebagaimana di ungkap oleh Gano Perhatikan Zebua (mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang mengatakan bahwa:

Sepengetahuan saya politik dinasti itu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Kalau berbicara politik dinasti dalam perspektif mahasiswa itu menurut saya politik dinasti itu politik yang menggunakan sistem kekeluargaan demi kepentingan sorang pemimpin terhadap anggotanya dengan memanfaatkan kekuasaan atau pun jabatan yang sedang dijalankannya karna ada suatu kepentingan baik itu kepentingan untuk keluarga, untuk pekerjaan ataupun yang lainnya, yang dalam suatu kelompok tersebut mereka menggunakan politik dinasti itu demi memanfaatkan dari pada kekuasaan. (wawancara, Kamis 13 Juni 2024).

21

Hal senada juga di ungkap oleh Fanida Gulo (mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), bahwa:

Sejauh pengamatan saya persoalan politik dinasti itu sangat melanggar suatu peraturan dimana peraturan yang sudah di tetapkan seolah-olah tidak mengikuti aturan atau sama artinya tidak mempedulikan, demi mencapai tujuan dalam memegang suatu kekuasaan. Sedangkan dari sudut pandangan saya sebagai mahasiswa bahwa politik dinasti itu politik yang sangat bertentangan sekali dari pada satu aturan dengan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain dalam hal memimpin suatu lembaga tetapi lebih memilih keluarga atau orang terdekatnya yang menjadi pemimpin atau penguasa. (wawancara, Jum'at 14 Juni 2024).

Politik dinasti dapat mengancam prinsip demokrasi ketika kekuasaan atau pengaruh politik terkonsentrasi di tangan keluarga atau sekelompok kecil orang, ada risiko oligarki atau monopoli kekuasaan politik yang dapat menghambat partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana diungkap oleh Calvin Armen Lahagu (mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), yang menyatakan bahwa:

Menurut saya politik dinasti itu bisa dikatakan suatu sikap yang melawan atau melanggar suatu aturan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan suatu tantangan atau suatu masalah. Sedangkan dalam perspektif saya, tentang politik dinasti itu tindakan yang dilakukan sorang pemimipin dengan mewariskan suatu jabatan terhadap keluarganya sendiri, tidak memberikan kesempatan terhadap orang lain yang lebih berkompetensi, karna misalnya seorang pemimpin memilih anaknya sebagai pengganti dari jabatannya tersebut belum tentu punya kemampuan dalam memimpin suatu organisasi. (wawancara, Sabtu 22 Juni 2024).

Hal senada diungkapkan respon Elman Priadi Gulo (mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), bahwa:

Menurut saya Politik dinasti itu merujuk pada praktik di mana kekuasaan atau pengaruh politik diwariskan di dalam satu keluarga atau dinasti. (wawancara, Sabtu 22

Juni 2024).

40

Hal serupa diungkapkan oleh informan Osakdiman Zega (mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi), bahwa:

Menurut pandangan saya Politik dinasti merupakan serangkaian strategi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kekuasaan, agar kekuasaan tetap menjadi milik mereka dengan cara mengalihkan kekuasaan yang telah mereka pegang kepada orang lain yang berkaitan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. (wawancara, Sabtu 29 Juni 2024).

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Politik dinasti merujuk pada praktik di mana kekuasaan atau pengaruh politik dalam suatu keluarga tertentu diwariskan atau dipertahankan dari generasi ke generasi. Dalam pandangan mahasiswa atau kalangan akademik, politik dinasti sering kali dianggap sebagai fenomena yang memiliki beberapa dampak negatif dan kontroversial dalam sistem politik sebuah negara.

4.2.2. Mengapa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Dalam konteks demokrasi, banyak yang mengkritik praktik ini karena dinasti dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat dan kurang mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mendorong rotasi kekuasaan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan oleh Gano Perhatikan Zebua (mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang menyatakan bahwa:

Dalam pandangan saya sebagai mahasiswa, bahwa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi saat ini karena dalam politik dinasti itu sudah melanggar alam demokrasi atau suatu bentuk perjalanan demokrasi karena dalam suatu kepentingan politik dinasti itu berpihak pada kepentingan suatu pihak saja artinya dalam melaksanakan kepemimpinannya itu berpihak kepada kepentingan yang adanya pengaruh atau kepentingan dari yang mempengaruhi. (wawancara, Kamis 13 Juni 2024).

Hal senada diungkapkan oleh Fanida Gulo (mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), bahwa:

21

Dalam pandangan saya jelas bahwa politik dinasti itu sangat tidak sesuai dengan alam demokrasi dikarenakan kalau kita lihat demokrasi saat ini sangat memperhatikan sekali dimana azas hukum yang telah di buat dan peraturan yang telah di atur berupaya mengubah dengan dengan tujuan kepentingan keluarga atau kelompok demi mencapai

target dalam mewariskan jabatan terhadap keluarga seorang pemimpin. (wawancara, Jum'at 14 Juni 2024).

Demokrasi yang baik memiliki beberapa karakteristik penting yang berkontribusi pada keberhasilannya dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah partisipasi yang aktif, masyarakat memiliki kesempatan dan motivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, debat kebijakan, dan partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Sebagaimana diungkapkan oleh Calvin Armen Lahagu (mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), bahwa:

Menurut pandangan saya bahwa politik tidak sesuai dengan alam demokrasi itu karena politik dinasti itu hanya menciptakan dimana kekuasaan yang dijalani seorang pemimpin itu hanya kelompok keluarga saja, sehingga tidak menghiraukan dari pada kepentingan orang lain atau umum. Sehingga dengan cara tersebut hanya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan serta mengurangi kesempatan bagi individu-individu dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dan mewakili masyarakat secara merata. (wawancara, Sabtu 22 Juni 2024).

Hal senada juga diungkapkan Elman Priadi Gulo (mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), bahwa:

Karena saya sebagai mahasiswa maka saya berpendapat tentang politik dinasti itu tidak sesuai dengan alam demokrasi dikarenakan kalau kita lihat politik dinasti itu hanya menutup kesempatan terhadap orang lain sehingga tidak tercermin nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya, karena di hambat oleh kepentingan keluarga seorang pemimpin atau kelompok. (wawancara, Sabtu 22 Juni 2024).

Hal serupa diungkapkan oleh informan Osakdiman Zega (mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi), bahwa:

Menurut pandangan saya tentang politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi disebabkan karena politik dinasti ini cenderung hanya memprioritaskan kepentingan-kepentingan keluarga atau kepentingan kerabat tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keadilan masyarakat secara keseluruhan. (wawancara, Sabtu 29 Juni 2024).

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik tidak sesuai dengan alam demokrasi, pertama karena Ketergantungan pada keluarga dari pada kompetensi, dalam sistem politik dinasti kepemimpinan atau posisi politik cenderung ditentukan oleh hubungan darah bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi individu. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang kurang berkualitas atau tidak kompeten, karena hanya memanfaatkan popularitas atau keturunan. Kedua ketidakadilan dan kesenjangan

sosial, politik dinasti sering kali memperkuat ketimpangan sosial karena memberikan kekuasaan atau kesempatan yang berkelanjutan kepada segelintir keluarga atau kelompok, yang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kekuatan politik. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok yang berkuasa dan rakyat umum.

8 4.3. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung, wawancara serta dokumentasi lapangan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan fenomena politik dinasti sebagai tantangan bagi sistem demokrasi di Indonesia dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan subjek dan tidak lupa mengumpulkan dan mengambil dokumentasi. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, dibawah ini akan dibahas satu persatu hasil penelitian yang telah dilakukan.

4.3.1. Bagaimana politik dinasti tersebut dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Politik dinasti adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang telah di buat dan ditetapkan untuk mengatur perilaku, tindakan dan proses dalam suatu sistem atau masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan keteraturan dan memastikan keadilan. Politik dinasti bisa dikatakan politik yang menggunakan sistem kekeluargaan demi kepentingan seorang pemimpin dengan memanfaatkan kekuasaan yang sedang di pegang oleh seseorang lalu menobatkan seseorang yang berasal dari keluarganya itu sendiri untuk menjadi penerus kekuasaan dari jabatan yang sedang di jalani dari keluarga tersebut. Politik dinasti dapat juga terjadi dengan memberi pekerjaan lain atau kedudukan terhadap orang terdekatnya yang dalam suatu sistem tersebut mereka mempunyai hubungan dekat.

Sikap dari suatu politik dinasti sangat memperlihatkan bahwa tindakan tersebut adanya ketidak pedulian terhadap peraturan yang telah di buat bahwa politik dinasti melanggar peraturan yang ada. Peraturan ini bisa berupa hukum, regulasi, atau norma yang dirancang untuk memastikan keberagaman dalam politik, mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, dan mempromosikan keadilan serta transparansi dalam proses politik. Praktik politik dinasti seolah-olah tidak mengikuti aturan artinya, meskipun ada peraturan yang ditetapkan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu keluarga atau kelompok, praktik

dinasti seringkali melanggar atau mengabaikan peraturan tersebut. politik dinasti dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mempertahankan atau memperluas kekuasaan.

Dalam konteks ini, biasanya mencerminkan kepedulian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang baik. Sering kali menilai sistem politik berdasarkan sejauh mana sistem tersebut mendukung kesempatan yang sama bagi semua orang dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat. Politik dinasti merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik terkonsentrasi dalam satu keluarga atau kelompok keluarga yang sama. Dalam sistem ini, kekuasaan cenderung diwariskan atau dipindahkan ⁷⁴ dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. politik dinasti dianggap sangat bertentangan dengan aturan atau prinsip yang mendasari sistem pemerintahan yang adil dan merata. Aturan-aturan ini sering kali termasuk prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesempatan yang sama.

Politik dinasti bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip ini karena: pertama, Politik dinasti sering kali membatasi kesempatan bagi orang lain untuk memimpin atau mengambil peran penting dalam pemerintahan atau lembaga. Dengan memilih hanya anggota keluarga atau orang terdekat sebagai pemimpin, kesempatan untuk individu lain yang mungkin memiliki kualifikasi dan visi yang berbeda menjadi terbatas. Kedua, Praktik ini mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, bukannya memilih pemimpin berdasarkan kemampuan individu. Hal ini bisa menyebabkan kekuasaan yang tidak sehat dan kurangnya inovasi serta perspektif baru dalam pemerintahan.

Dalam politik dinasti, pemilihan pemimpin sering kali didasarkan pada hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, bukan pada kompetensi atau pilihan publik yang objektif. Ini bisa mengakibatkan pemimpin yang kurang berkualitas atau kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Politik dinasti merujuk pada sistem di mana kekuasaan politik atau jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan diwariskan ¹⁰ dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Dalam sistem semacam ini, kekuasaan sering kali tetap berada dalam satu keluarga atau kelompok. Politik dinasti sering kali mendapatkan posisi dan kekuasaan bukan karena prestasi atau kemampuan mereka, tetapi karena hubungan keluarga. Ini bisa menghambat kesempatan bagi individu yang mungkin lebih kompeten tetapi tidak memiliki latar belakang keluarga yang sama. Pada sistem politik yang ideal, posisi dan kekuasaan harus diperoleh

berdasarkan kompetensi dan kontribusi, bukan keturunan. Politik dinasti bisa dianggap melawan prinsip meritokrasi ini, di mana seleksi pejabat publik seharusnya didasarkan pada kemampuan dan bukan pada hubungan keluarga. Kepentingan Pribadi dengan kepentingan Publik ketika kekuasaan terpusat dalam satu keluarga, ada risiko bahwa kebijakan dan keputusan akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga ketimbang kepentingan publik yang lebih luas. Ini bisa menimbulkan masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masalah keterbatasan inovasi, Jika kekuasaan terus-menerus berada dalam satu dinasti, bisa jadi ada kurangnya inovasi dan ide baru dalam pemerintahan, karena seringkali dinasti politik lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan dari pada melakukan reformasi atau perubahan yang mungkin diperlukan.

Politik dinasti merujuk pada praktik di mana seorang pemimpin atau penguasa mewariskan jabatan atau kekuasaan kepada anggota keluarganya sendiri, biasanya tanpa memperhatikan apakah orang tersebut memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai. Ini berarti bahwa jabatan yang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan sering kali jatuh ke tangan keluarga, seperti anak, saudara, atau kerabat dekat dari pemimpin yang sedang menjabat. Masalah utama dari politik dinasti adalah Mengabaikan Kompetensi dengan mewariskan jabatan kepada anggota keluarga, tidak ada jaminan bahwa orang yang menggantikan posisi tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, atau pengalaman yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif. Misalnya, seorang pemimpin mungkin memilih anaknya sebagai pengganti, meskipun anak tersebut mungkin tidak memiliki latar belakang atau kemampuan yang sesuai untuk memimpin organisasi dengan baik. Kemudian kurangnya kesempatan untuk individu lain artinya politik dinasti sering kali menutup kesempatan bagi individu yang lebih berkompeten tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin yang sedang menjabat. Hal ini bisa membatasi potensi inovasi dan kemajuan, karena orang-orang yang mungkin lebih berbakat atau memiliki ide baru tidak diberikan kesempatan untuk memegang posisi kekuasaan.

Ketika kekuasaan dan jabatan diwariskan dalam satu keluarga, ada risiko bahwa keputusan yang diambil mungkin lebih memprioritaskan kepentingan keluarga dari pada kepentingan publik, ini dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang efektif atau bahkan merugikan masyarakat luas. Politik dinasti adalah praktik di mana kekuasaan politik dipertahankan dalam satu keluarga atau kelompok yang sama dari generasi ke generasi.

Strategi ini sering kali melibatkan proses di mana kekuasaan yang ada dipindahkan atau diwariskan kepada anggota keluarga atau orang-orang dekat dari pemegang kekuasaan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan kelompok yang sama dan tidak berpindah ke tangan pesaing luar.

4.3.2. Mengapa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Politik dinasti mengacu pada praktek di mana kekuasaan politik atau jabatan publik dipegang oleh anggota keluarga yang sama secara turun-temurun. Dalam konteks demokrasi, politik dinasti sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal. Demokrasi menekankan pentingnya kesetaraan yaitu bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan maju berdasarkan kemampuan mereka. Dalam politik dinasti, jabatan politik sering kali diwariskan berdasarkan hubungan keluarga, bukan berdasarkan prestasi atau kemampuan. Ini bisa mengabaikan prinsip bahwa posisi publik harus diperoleh melalui kompetisi terbuka dan adil.

Politik dinasti dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok kecil. Ini berpotensi mengurangi representasi dan keragaman dalam pemerintahan. Kekuasaan yang terkonsentrasi bisa mengarah pada pengabaian kepentingan masyarakat luas demi kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Politisi yang berasal dari dinasti mungkin lebih cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya sendiri dari pada kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini dapat mengarah pada nepotisme, di mana keputusan-keputusan politik dan kebijakan dibuat untuk keuntungan kelompok tertentu alih-alih untuk kebaikan umum.

Politik dinasti dinilai sangat tidak sesuai dengan alam demokrasi saat ini karena beberapa alasan terkait pelaksanaan hukum dan peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, hukum dan peraturan dibuat untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan pemerintahan yang adil. Namun, politik dinasti dapat menyebabkan peraturan dan hukum dimanipulasi atau diubah untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika pejabat yang berasal dari dinasti berusaha membuat kebijakan yang memungkinkan mereka atau keluarga mereka untuk tetap

berkuasa. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan merusak integritas sistem hukum.

Politik dinasti sering melibatkan pemimpin yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkuat posisi keluarga atau kelompok mereka, alih-alih melayani kepentingan masyarakat secara umum. Ini bisa mengakibatkan pembuatan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan bukan kepentingan publik. Dalam demokrasi, pejabat publik diharapkan membuat keputusan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau keluarga. Salah satu ciri khas politik dinasti adalah adanya upaya untuk mewariskan jabatan atau kekuasaan kepada anggota keluarga.

Dalam sistem demokrasi yang baik, jabatan publik harus diperoleh melalui proses yang adil dan transparan. Politik dinasti di sisi lain menciptakan situasi di mana kekuasaan diwariskan berdasarkan hubungan keluarga, bukan berdasarkan kemampuan, kualifikasi, atau dukungan rakyat. Ketika politik dinasti mendominasi ini dapat mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Masyarakat mungkin merasa bahwa peluang untuk terlibat atau mempengaruhi kebijakan terbatas jika kekuasaan selalu berada dalam lingkaran keluarga yang sama. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum, bukan hanya kelompok tertentu.

Politik dinasti sering kali menyebabkan kekuasaan terpusat pada satu keluarga atau kelompok kecil. Ketika posisi kekuasaan diwariskan di dalam keluarga keputusan dan kebijakan cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan anggota keluarga tersebut. Ini dapat mengabaikan kepentingan masyarakat luas, yang seharusnya menjadi prioritas dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan harus diperoleh dan dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya kelompok keluarga atau individu tertentu. ¹⁰ Kekuasaan yang terpusat dalam keluarga atau kelompok tertentu dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika seorang pemimpin dari dinasti menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil. Dalam sistem demokrasi yang baik, kekuasaan harus diawasi dan dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil menguntungkan masyarakat secara luas. Politik dinasti dapat mengurangi kesempatan bagi individu dari latar belakang yang berbeda

untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketika posisi politik selalu diwariskan di dalam satu keluarga atau kelompok, individu lain yang mungkin memiliki potensi yang baik bisa kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dan mewakili masyarakat.

Demokrasi yang sehat harus menyediakan peluang yang sama bagi semua individu untuk terlibat dalam politik, tanpa memandang latar belakang keluarga atau status sosial. Dalam sistem politik dinasti, representasi dalam pemerintahan cenderung tidak merata. Jika kekuasaan dikendalikan oleh satu keluarga, maka suara dan kepentingan kelompok lain mungkin diabaikan. Demokrasi idealnya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki perwakilan yang adil dan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok, bukan hanya kepentingan keluarga yang berkuasa.

Politik dinasti sering kali melibatkan pewarisan kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini secara langsung membatasi kesempatan bagi individu lain dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap individu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan memperoleh jabatan publik berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau status sosial.

Ketika kekuasaan terkonsentrasi dalam satu keluarga atau kelompok ada risiko bahwa suara dan kepentingan kelompok lain diabaikan. Demokrasi memerlukan representasi yang adil dan merata dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya politik dinasti, kebijakan dan keputusan yang diambil mungkin lebih mencerminkan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, bukan kepentingan publik secara keseluruhan. Ini mengurangi keanekaragaman perspektif dan kepentingan dalam pemerintahan. Politik dinasti dapat menghambat nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kesetaraan kesempatan, akuntabilitas, dan transparansi. Demokrasi menekankan pentingnya sistem yang adil dan terbuka di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketika kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga, prinsip-prinsip ini dapat terabaikan karena keputusan politik cenderung lebih fokus pada kepentingan keluarga yang berkuasa daripada kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum.

Politik dinasti sering kali melibatkan pewarisan kekuasaan di dalam satu keluarga atau kelompok kecil. Dalam sistem ini, keputusan politik dan kebijakan cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dari pemimpin yang berkuasa. Prioritas ini dapat mengarah

pada keputusan yang lebih bermanfaat untuk keluarga atau kelompok tersebut dari pada untuk masyarakat secara umum. Ketika kekuasaan dikuasai oleh dinasti politik, sering kali terdapat pengabaian terhadap kebutuhan dan keadilan masyarakat luas. Keputusan yang diambil mungkin lebih berorientasi pada keuntungan pribadi keluarga atau kelompok yang berkuasa, bukan pada kesejahteraan umum.

Dalam sistem demokrasi yang ideal, kebijakan dan keputusan seharusnya mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan. Politik dinasti bisa menyebabkan ketidakadilan dengan menghalangi individu dari latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam proses politik. Ini berpotensi menciptakan ketimpangan di mana kekuasaan tetap terpusat pada keluarga atau kelompok tertentu, mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya menjamin kesempatan yang sama bagi semua orang. Dalam sistem politik dinasti, keterwakilan dan diversitas dalam pemerintahan bisa berkurang. Ketika posisi politik dipegang oleh anggota keluarga atau kerabat yang sama, ada risiko bahwa suara dan kepentingan kelompok lain mungkin tidak mendapat perhatian yang layak. Demokrasi membutuhkan representasi yang luas dari berbagai segmen masyarakat untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan dapat diakomodasi dengan baik.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, maka dapat peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik dinasti dalam perspektif mahasiswa merupakan politik yang mengatasnamakan sistem kekeluargaan atau kepentingan pemimpin terhadap bawahan dan pemanfaatan kekuasaan jabatan yang di pegang oleh pemimpin terhadap bawahan tersebut karena ada kepentingan baik itu dari kekeluargaan atau kepentingan pekerjaan dan sebagainya, yang dalam satu kubu yang notabennya adalah mereka satu view dan ketika mereka menggunakan politik dinasti itu mereka memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk mempengaruhi seseorang. Politik dinasti itu merujuk pada praktik di mana kekuasaan atau pengaruh politik diwariskan di dalam satu keluarga atau dinasti. Politik dinasti dikatakan suatu sikap yang melawan atau melanggar suatu aturan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan suatu tantangan atau suatu masalah. Politik dinasti merupakan tindakan yang dilakukan sorang pemimipin dengan mewariskan suatu jabatan terhadap keluarganya sendiri, tidak memberikan kesempatan terhadap orang lain yang lebih berkompetensi, karna misalnya seorang pemimpin memilih anaknya sebagai pengganti dari jabatannya tersebut belum tentu punya kemampuan dalam memimpin suatu organisasi.
2. Politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias karena salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah keterwakilan yang adil dari kepentingan masyarakat yang beragam. Politik dinasti cenderung menciptakan kelompok kecil di mana kekuasaan dan pengaruh politik terkonsentrasi di tangan sedikit keluarga atau individu. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, serta mengurangi kesempatan bagi individu-individu dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dan mewakili masyarakat secara merata. Dalam sistem demokratis ideal, akses terbuka terhadap jabatan-jabatan publik harus diperjuangkan berdasarkan kualifikasi dan dedikasi, bukan hubungan keluarga. Politik dinasti cenderung

hanya memprioritaskan kepentingan-kepentingan keluarga atau kepentingan kerabat tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keadilan masyarakat secara keseluruhan.

5.2. Saran

Masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kualitas arah kemajuan dan perkembangan demokrasi sebagai negara demokrasi. Kesuksesan sistem demokrasi dianggap bergantung pada masyarakat. Dengan kata lain, meningkatkan demokrasi merupakan tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya pemerintah. Hak politik rakyat termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya orang ikut serta dalam pembangunan negara demokratis. Menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap individu dan lembaga pemerintahan adalah salah satu cara masyarakat bertindak. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi dapat diberikan di bawah ini.

5.2.1. Masyarakat

Masyarakat harus dididik tentang demokrasi dan memahami dunia politik dengan cara mengikuti berita politik dari berbagai sumber terpercaya seperti surat kabar, situs berita, media elektronik yang membantu masyarakat memahami perkembangan terkini dan isu-isu politik. Selain itu juga masyarakat harus mampu memahami arah dari pada politik dengan cara bergabung dalam forum dan diskusi misalnya ikut serta dalam diskusi politik, seminar, atau forum yang sering dilaksanakan komunitas sehingga diskusi tersebut dapat memberikan wawasan yang mendalam dan pandangan yang berbeda dengan tujuan yang positif.

5.2.2. Pemerintah

Pemerintah sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam mengatur, memimpin dan mengelola negara atau wilayah supaya memperkuat pengawasan terhadap prakti-praktik yang bertentangan dengan azas demokrasi, menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan konsisten. Meningkatkan pendidikan politik terhadap masyarakat agar lebih memahami dampak negatif dari politik dinasti dan memilih pemimpin berdasarkan kinerja dan kemampuan yang dimiliki.

FENOMENA POLITIK DINASTI SEBAGAI TANTANGAN BAGI SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NIAS

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.iftkledalero.ac.id Internet	517 words — 5%
2	e-jurnal.lppmunsera.org Internet	268 words — 2%
3	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	180 words — 2%
4	indahdevi92.blogspot.com Internet	130 words — 1%
5	repositori.unsil.ac.id Internet	126 words — 1%
6	123dok.com Internet	90 words — 1%
7	www.usd.ac.id Internet	78 words — 1%
8	journal.ikipgunungsitoli.ac.id Internet	68 words — 1%
9	www.j-cup.org Internet	58 words — 1%

10	www.jptam.org Internet	57 words — 1%
11	studyandlearningnow.blogspot.com Internet	52 words — < 1%
12	wansptrablog.blogspot.com Internet	49 words — < 1%
13	ejournal.unsrat.ac.id Internet	41 words — < 1%
14	repository.iainkudus.ac.id Internet	39 words — < 1%
15	repository.umy.ac.id Internet	39 words — < 1%
16	mahasiswaindonesia.id Internet	36 words — < 1%
17	core.ac.uk Internet	30 words — < 1%
18	openjournal.unpam.ac.id Internet	29 words — < 1%
19	edipurwantosapudi.blogspot.com Internet	27 words — < 1%
20	www.beritaindonesia.co.id Internet	27 words — < 1%
21	eprints.umpo.ac.id Internet	26 words — < 1%

22	lpm.una.ac.id Internet	25 words — < 1%
23	kotomono.co Internet	22 words — < 1%
24	www.dictio.id Internet	22 words — < 1%
25	Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani, Zulfa Harirah MS. "The Image of Political Dynasty in Filling the Administrative Position", Journal of Political Issues, 2020 Crossref	21 words — < 1%
26	eprints.walisongo.ac.id Internet	21 words — < 1%
27	es.scribd.com Internet	20 words — < 1%
28	id.123dok.com Internet	20 words — < 1%
29	undana.ac.id Internet	19 words — < 1%
30	pdfcoffee.com Internet	18 words — < 1%
31	repository.upnjatim.ac.id Internet	18 words — < 1%
32	www.scribd.com Internet	18 words — < 1%

chibariencesds.blogspot.com

33	Internet	17 words — < 1%
34	repository.unwira.ac.id Internet	17 words — < 1%
35	stiepembnas.ac.id Internet	17 words — < 1%
36	www.identitas.net Internet	17 words — < 1%
37	www.slideshare.net Internet	17 words — < 1%
38	text-id.123dok.com Internet	16 words — < 1%
39	digilib.uinsa.ac.id Internet	15 words — < 1%
40	repository.ar-raniry.ac.id Internet	15 words — < 1%
41	repository.radenintan.ac.id Internet	15 words — < 1%
42	repository.ulb.ac.id Internet	14 words — < 1%
43	eprints.umm.ac.id Internet	13 words — < 1%
44	hendrath-jmr.blogspot.com Internet	13 words — < 1%
45	repository.iainpare.ac.id	

Internet

13 words — < 1%

46 s3.amazonaws.com
Internet

13 words — < 1%

47 digitallib.iainkendari.ac.id
Internet

12 words — < 1%

48 eprints.ums.ac.id
Internet

12 words — < 1%

49 repo.uinsatu.ac.id
Internet

12 words — < 1%

50 repository.upy.ac.id
Internet

11 words — < 1%

51 artikelpendidikan.id
Internet

10 words — < 1%

52 ditjenpp.kemenkumham.go.id
Internet

10 words — < 1%

53 fellyonanda95.blogspot.com
Internet

10 words — < 1%

54 repository.uinsu.ac.id
Internet

10 words — < 1%

55 segudangnyailmu.blogspot.com
Internet

10 words — < 1%

56 www.unsyiah.ac.id
Internet

10 words — < 1%

57 Wining Helsavana Buulolo, Sadiana Lase, Yulisman Zega, Ratna Natalia Mendrofa. "Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa yang Diajar dengan Model Pembelajaran Problem Posing dan Problem Based Learning di SMA Negeri 1 Susua", Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 2024
Crossref 9 words — < 1%

58 anthogoodwill-stiabone.blogspot.com
Internet 9 words — < 1%

59 bakir.blogspot.com
Internet 9 words — < 1%

60 docplayer.info
Internet 9 words — < 1%

61 e-learning.undwi.ac.id
Internet 9 words — < 1%

62 ipb.ac.id
Internet 9 words — < 1%

63 nl.wikipedia.org
Internet 9 words — < 1%

64 ragieljiwo.blogspot.com
Internet 9 words — < 1%

65 waitingroom-april.blogspot.com
Internet 9 words — < 1%

66 www.beritasatu.com
Internet 9 words — < 1%

67 www.uf1.info
Internet 9 words — < 1%

68	Adelia Fitri. "Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal", KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019 Crossref	8 words — < 1%
69	andiadmirals.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
70	journal.ummat.ac.id Internet	8 words — < 1%
71	jurnal.ideaspublishing.co.id Internet	8 words — < 1%
72	potretdesatertinggal.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
73	psq.or.id Internet	8 words — < 1%
74	repository.ub.ac.id Internet	8 words — < 1%
75	repository.umsu.ac.id Internet	8 words — < 1%
76	repository.unja.ac.id Internet	8 words — < 1%
77	repository.upi.edu Internet	8 words — < 1%
78	www.aspirasipublik.com Internet	8 words — < 1%
79	www.researchgate.net Internet	8 words — < 1%

8 words — < 1%

80 www.telaga.org
Internet

8 words — < 1%

81 Edy Wibowo. "ANALISIS KEMAMPUAN
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PESERTA
DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL TRIGONOMETRI PADA
KELAS X MIADI SMA NEGERI 1 LUWUK", INA-Rxiv, 2018
Publications

6 words — < 1%

82 www.dosenpendidikan.co.id
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF